

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variabel utama dalam penelitian ini adalah studi tentang beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislative di kabupaten sumba timur, tahun 2019. Studi tentang beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislative di kabupaten sumba timur, tahun 2019 adalah Hambatan politik, Hambatan sosio-ekonomi, Hambatan sosial budaya, yang akan dianalisis melalui indikator sebagai berikut:

5.1 Hambatan Politik

Yang dimaksud dengan hambatan politik dalam partisipasi politik caleg perempuan di lembaga legislative dapat dilihat dari pola rekrutmen caleg perempuan, pendidikan politik bagi kaum perempuan.

5.1.1 Pola Rekrutmen

Perekrutan caleg perempuan di tingkat partai politik menjadi sarana yang sangat penting bagi kaum perempuan guna meningkatkan kualitas bagi caleg perempuan di lembaga legislative. Di tingkat partai, perempuan yang berkualitas dapat duduk di kepengurusan partai politik atau masuk dalam struktur organisasi partai yang dimana kaum perempuan mempunyai hak untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa pola perekrutan yang dilakukan oleh parpol, penulis menemukan bahwa pola perekrutan sudah sesuai dengan undang-undang pemilu akan tetapi setelah di rekrut partai politik tidak menjalankan tugas dengan fungsinya sebagai partai pengusung. Untuk memperkuat hasil temuan di atas penulis mewawancarai salah satu pengurus partai PSI, Bapak Samuel H. Pati beliau mengatakan bahwa:

”Partai PSI inikan partai baru pertama kali ikut dalam pemilu legislatif pada tahun 2019 kemarin dan baru terdaftar untuk partai itu sendiri pola perekrutan caleg perempuan di lembaga legislative wajib hukumnya dengan kuota adalah 30% karena kalau tidak sesuai maka partai itu tidak akan lolos dalam pemilihan pileg kemarin. Pola perekrutan yang dilakukan kepercayaan

masyarakat untuk memilih itu unturnya sangat kecilkan partai kami, sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada caleg perempuan yang direkrut bukan asal direkrut akan tetapi mereka sudah bagian dari partai tersebut tapi dalam pileg kemarin perempuan tidak terpilih karena kepercayaan masyarakat itu sendiri tentang caleg perempuan.”¹

Sama halnya hasil wawancara dengan Bapak Ferdi Tiberius L. Djehasa ST, pengurus partai Demokrat Kabupaten Sumba Timur dia mengatakan bahwa:

“Kami dari partai Demokrat sudah merekrut caleg perempuan yang mempunyai kapasitas yang setara dengan kaum laki-laki, ketika kaum perempuan turun sosialisasi di masyarakat dari rumah- rumah mereka memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat, yang menjadi persoalannya adalah tua adat yang ada di kampung lebih mengarahkan masyarakatnya cenderung memilih caleg laki-laki, karena laki-laki mempunyai kapasitas yang jauh lebih bagus dari kaum perempuan.”²

Tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh pengurus partai NASDEM Bapak Niko Demus Hamakonda beliau mengatakan bahwa:

“Pola rekrutan dari partai kami sudah menjalankan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, akan tetapi kaum perempuan di jaman sekarang mereka menganggap bahwa politik hanya dunianya kaum laki-laki. Sehingga tidak heran kalau perempuan di rekrut oleh partai hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan.”³

Sama juga yang dikatakan oleh Bapak. Dominggus L. Haling salah satu pengurus partai PAN beliau mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pengurus partai PAN dalam proses perekrutan setiap caleg perempuan kami sudah menjalankan berdasarkan undang-undang pemilu. Oleh karena itu untuk memenuhi

¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Samuel H. Pati, Tanggal 15 April 2019

² Wawancara dengan Bpk. Ferdi Tiberius L, Djehasa ST, Tanggal 16 April 2019

³ Wawancara dengan Bpk. Niko Demus Hamakonda, Tanggal 15 april 2019

kuota 30% caleg perempuan dalam partai kami, di dapil kami dapil IV dapat memperoleh kursi sebanyak 8 kursi, jadi 5 untuk kursi laki-laki dan 3 untuk kursi caleg perempuan.”⁴

Senada juga apa yang di sampaikan oleh Bapak Oktavianus Landi, ST selaku ketua KPUD Kabupaten Sumba Timur Beliau Mengatakan Bahwa:

“Memang parpol sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi mereka belum betul-betul merekrut caleg perempuan dengan serius mereka hanya merekrut begitu-begitu saja untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan untuk menyelamatkan Partai mereka sehingga mereka tidak serius dalam merekrut caleg perempuan, seharusnya parpol tidak boleh seperti itu karena ada jga caleg perempuan yang bias berperan dalam dunia politik sebenarnya.”⁵

Dari hasil wawancara dengan kedua pengurus parpol diatas menunjukkan bahwa parpol sudah menjalankan sesuai tupoksinya akan tetapi dalam hal memilih partai tidak dapat memaksa masyarakat sebagai penentu untuk memilih caleg perempuan atau tidak. Sangat jauh berbeda yang disampaikan oleh salah satu caleg perempuan yang tidak terpilih dari partai HANURA Ibu Yohana Yowa Tangu, beliau mengatakan bahwa:

“Pola perekrutan oleh partai sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kita harus bagian dari partai tersebut, akan tetapi setelah di tetapkan menjadi calon legislative. Namun dalam perjalanan saya sangat merasa kecewa sekali karena partai merekrut saya hanya sebagai pelengkap pemenuhan kuota 30% bagi kaum perempuan dan untuk menyelamatkan partai mereka. Saya sangat berharap kedepanya budaya seperti itu kalau bisa dihilangkan karena dapat menghambat atau mempersulit bagi kami kaum perempuan ketika kami ingin terjun kedua politik.”⁶

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Adriana Moki Babang beliau menyatakan bahwa:

⁴ Wawancara Dengan Bpk. Dominggus L. Haling , Tanggal 18 April 2019

⁵ Wawancara dengan Bpk, Oktavianus Landi, ST , Tanggal 19 April 2019

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yohana Yowa Tangu, Tanggal 29 April 2019

“Pola perekrutan yang dilakukan oleh partai yang merekrut saya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang yang berjalan, sebenarnya saya belum siap untuk bergabung dengan partai tersebut karena ada paksaan dari partai tersebut untuk memenuhi kuota 30% caleg perempuan mau tidak mau saya harus mengikuti untuk menyelamatkan partai tersebut, di satu sisi saya juga melihat ketika kami di calonkan budaya patriarki masih sangat mempengaruhi partisipasi kami kaum perempuan sehingga pada saat itu saya di paksa hanya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.”⁷

Dari kedua caleg tidak terpilih di atas memiliki kesamaan kesamaan pendapat dengan keempat caleg tidak terpilih Ibu Jeni Humba Tamar, Ibu Rambu Loda Amah Amah, Ibu Rosye Martje Awang dan Ibu Elisabeth dimana yang mengatakan bahwa partai sudah merekrut sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan oleh undang-undang pemilu, namun dalam perjalanan kedepannya fungsi kepartaian sebagai partai pengusung tidak memberikan sedikit kontribusi dalam mendukung calonnya dalam proses pengenalan caleg perempuan kepada masyarakat dan pada saat kampanye.

Berkaitan dengan pendapat dari pengurus partai politik dengan caleg perempuan tidak terpilih penulis mewawancarai dengan masyarakat pemilih, kepala desa, dan tokoh adat pada saat diminta untuk memberikan pendapat soal perekrutan caleg perempuan mereka memberikan tanggapan yang sama, bahwa berkaitan dengan pola perekrutan kami sebagai masyarakat pemilih tidak terlibat dalam hal itu, dan kami sebagai pemilih dan sudah terdaftar sebagai DPT maka kewajiban kami hanya meentukan pilihan kami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat disimpulkan bahwa pola perekrutan caleg perempuan partai sudah menjalankan aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang menyertakan kuota 30% bagi caleg perempuan pada partai politik, akan tetapi menjalankan tupoksinya sebagai parpol tidak menjalankan semestinya partai politik merekrut

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019

caleg perempuan agar partainya dapat memenuhi kuota dan bisa ikut dalam pemilu legislative tahun 2019 di Kabupaten Sumba Timur.

5.1.2 Pendidikan Politik

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat menemukan rendahnya keterwakilan caleg perempuan dalam bidang politik, dikarenakan kurangnya pendidikan politik bagi kaum perempuan, kurangnya pengalaman dan partisipasi bagi kaum perempuan dalam berorganisasi. Maka hal di atas dapat di perkuat dengan hasil wawancara seperti yang dikatakan oleh Ibu Jeni Humba Tamar salah satu caleg perempuan dari Partai DEMOKRAT mengatakan bahwa:

“Yang saya lihat selama ini kaum perempuan belum siap untuk terjun kedua politik karna sebuah perekrutan harusnya ada yang namanya pendidikan politik bagi kaum perempuan sehingga kami perempuan sangatlah kurang pendidikan politiknya, yang saya rasa tidak terlalu serius partai politik memberikan kami pendidikan dan cuman pengalaman-pengalaman saja yang kami dapat saat pertemuan, oleh karena saya sangat berharap ketika parpol ingin merekrut para caleg terlebih khusus kami kaum perempuan harus dibarengi juga dengan pendidikan politik serta sosialisasi yang dilakukan rutin sehingga kami juga tidak mersa canggung ketika dicalonkan menjadi anggota legislative.”⁸

Tidak jauh berbeda yang dikatakan oleh Ibu Elisabeth dari partai PSI beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari saya sendiri pendidikan saya tidak pernah dapatkan cuman pengalaman yang saya dapatkan karena saya salah satu tamatan dari SMA dan pernah menjadi ketua KPPS seiring waktunya berjalan mungkin saya dilihat selalu aktif dalam kegiatan apapun sehingga saya direkrut oleh partai PSI untuk bergabung. Dan saya diminta partai untuk turun ke desa-desa untuk sosialisasi.”⁹

⁸ Wawancara Dengan Ibu Jeni Humba Tamar, Tanggal 27 April 2019

⁹ Wawancara Dengan Ibu Elisabeth, Tanggal 30 April 2019

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rambu Loda Ana Amah, beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini saya di rekrut oleh partai politik pendidikan yang diberikan oleh partai sepertinya tidak ada sama sekali, setelah beberapa bulan bergabung kami saya cumin dapat pendidikan pengalaman dan pertemuan-pertemuan saja yang kami dapat, dan bagaimana sepak terjang partai kedepan dan bagaimana menjadi seorang caleg yang baik. Tidak ada pendidikan yang resmi yang kami dapatkan selama bergabung.”¹⁰

Sama halnya pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rosye Martje Awang beliau mengatakan bahwa:

“Begitu banyak hal yang saya dapatkan dari partai Golkar, semenjak saya di rekrut untuk bergabung ke partai Golkar dimana situ saya memahami betul-betul tupoksi dari seorang anggota DPRD, berkaitan dengan pendidikan yang di berikan oleh partai Golkar selama saya bergabung sama sekali tidak ada dibekali pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan.”¹¹

“sama halnya juga yang disampaikan oleh Ibu Adriana Moki Babang beliau mengatakan bahwa:

“pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik belum terlalu begitu serius, mereka hanya memberikan sedikit saja tentang pehaman bagaimana cara berpolitik yang baik, mereka lebih memprioritaskan terhadap caleg laki-laki, sehingga kami caleg perempuan memberikan pendidikan politik begitu-begitu saja.”¹²

Selanjutnya senada juga yang di sampaikan oleh Ibu Yohana Yowa Tangu beliau juga mengatakan bahwa:

“pendidikan politik selama ini yang saya dapat dari partai politik belum begitu banyak, setelah kami bergabung dengan partai politik yang kami dapat hanya pada saat ada pertemuan-

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Rambu Loda Ana Amah, Tanggal 28 April 2019

¹¹ Wawancara Dengan Ibu Rosye Martje Mauawang, Tanggal 30 April 2019

¹² Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019.

pertemuan saja, maka pendidikan politik yang diberikan oleh partai menurut pengalaman saya sama sekali tidak ada, kami hanya dapat pendidikan politik begitu-begitu saja.”¹³

Sama hal Peryataan yang disampaikan oleh Bapak Oktavianus Landi, ST selaku ketua KPUD Kabupaten Sumba Timur beliau mengatakan bahwa:

Sejauh ini partai politik sudah menjalankan tugasnya dengan benar, tetapi mereka belum benar-benar serius memberikan pendidikan politik bagi caleg perempuan sehingga caleg perempuan belum memahami bagaimana cara berpolitik yang baik, partai politik lebih proriaritaskan caleg laki-laki.¹⁴

Pendidikan yang seharusnya bukan salah satu bekal bagi caleg yang bertarung nanti di pileg dan tidak sepenuhnya harus dijalankan di setiap partai politik yang ada di Kabupaten Sumba Timur, dari keenam responden diatas kendala tidak terpilih memang sudah sepantasnya mereka terima, pendidikan hanya dapat berpetokan pada beberapa pengalaman yang mereka dapatkan selama ini.

Pendidikan politik yang seharusnya menjadi bekal bagi semua para caleg yang akan bertarung nanti pada pemilihan legislative tidak sepenuhnya di jalankan oleh semua partai yang ada di Kabupaten Sumba Timur, dari keenam responden diatas hambatan tidak terpilih memang sudah sepantasnya mereka dapatkan, pendidikan politik mereka hanya dapat berpatokan pada pengalaman-pengalaman yang didapat saja.

Menanggapi seperti hal yang disampaikan oleh caleg diatas penulis mewawancarai partai yang dijadikan responden, dari keempat pengurus partai mengatakan hal yang sama bahwa pendidikan yang mereka lakukan itu seperti kegiatan-kegiatan dalam lingkup partai, dan kami tidak perlu membuat suatu pendidikan yang resmi yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Untuk mewakili para masyarakat pemilih penulis mewawancarai seorang kepala desa Bapak Ndilu Maramba Djawa beliau mengataka:

¹³ Wawancara dengan Ibu Yohana Yowa Tangu, Tanggal 29 April 2019

¹⁴ Wawancara dengan Bpk, Oktavianus Landi, ST. Tanggal 19 April 2019

“Seharusnya pendidikan politik betul-betul dijalankan oleh setiap partai politik karena apa yang di dapat dilapangan sangat memperhatikan, selalu ini yang saya lihat dengan kepala mata saya sendiri caleg perempuan tidak pernah terjun ke masyarakat atau desa-desa setempat yang ada di kecamatan. Maka dilihat dari situ ada keseriusan tidak dari parpol untuk merekrut caleg perempuan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa partai politik tidak bekerja secara maksimal, untuk memberikan pendidikan politik bagi caleg perempuan yang mereka rekrut. Sehingga caleg perempuan belum terlalu paham tentang politik.

5.2 Hambatan Sosio-Ekonomi

Lemahnya sumber-sumber keuangan yang kurang memadai baik dari parpol maupun dukungan keluarga dalam aktifitas penggalangan masa seperti biaya sosialisasi, kampanye dan atribut kampanye (biaya stiker, dan baliho), beban ganda perempuan serta kurang adanya caleg perempuan yang dijadikan figur di Kabupaten Sumba Timur yang dianalisis melalui indikator sebagai berikut:

5.2.1 Beban Ganda Perempuan

Sebagaimana kita ketahui sejauh ini perempuan selalu dibebani dengan kodrat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka dari itu yang menjadi keharusan ini mau tidak mau mengurangi keterlibatan bagi kaum perempuan dalam berbagai bidang kehidupan politik. Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa persoalan beban ganda perempuan tidak menjadi suatu persoalan. Hal demikian perempuan yang dicalonkan rata-rata memiliki karirnya masing-masing. Akan tetapi hal ini juga dibantah oleh seorang pemilih yang mengatakan perempuan yang dapat dicalonkan adalah perempuan yang melanggar adat atau budayanya.

¹⁵ Wawancara dengan Bpk Ndilu Maramba Djawa, Tanggal 28 April 2019

Untuk mengetahui lebih lanjut beban ganda perempuan penulis mewawancarai Ibu Adriana Moki Babang beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini sebenarnya bukan persoalan ya atau tidak, dari sebelum saya menjadi caleg pada tahun kemarin saya menjadi ketua kelompok tani di kecamatannya saya, kalau sampe saya tidak terpilih di pileg tahun ini itu bukan suatu beban bagio saya. Beban ya beban bukan suatu tolak ukur buat saya untuk tidak terpilih. Saya sudah biasa mengurus rumah tangga dan pekerjaan saya sebagai kelompok tani.”¹⁶

Ada juga seorang masyarakat pemilih Ibu Emiliana Lemba panggađu beliau mengatakan bahwa:

“Saya berbicara dari pengalaman saya selama ini ya, pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan yang selalu menganggap perempuan mahluk yang lemah dan tidak berdaya bukan hal yang baru lagi kita dengar. Contoh kecilnya saja saya sebagai perempuan tugas saya selalu urus rumah tangga, dan bila ada pengambilan keputusan selalu di tentukan oleh suami dan saya pun ikut suami, hal ini menurut saya sangat tidak adil saya katakana begini karena sudah ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang ingin terlibat dalam dunia apapun termasuk terjun ke dunia politik.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber di atas, penulis menemukan bahwa beban ganda perempuan belum menjadi sebuah alasan yang tepat untuk katakan perempuan tidak terpilih. Jadi apa yang di sampaikan oleh kedua narasumber di atas sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh seorang masyarakat pemilih Bapak Lasarus Benu beliau mengatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya bila ada perempuan yang maju dalam pemilihan legislative itu sama dengan bohong melanggar adat atau budaya masyarakat sumba pada umumnya, mengapa saya katakan demikian karna tugas seorang perempuan cuman mengurus rumah tangga mereka dan melayani seorang suami. Kodrat kita tidak bisa abaikan, memang Negara mengakui

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019

¹⁷ Wawancara Dengan Ibu Emiliana Lemba Panggađu, Tanggal 25 April 2019

kesetaraan gender tapi kita susah untuk itu, masa dia seorang perempuan duduk di depan. Oleh karena itu menurut saya perempuan tidak perlu lagi untuk terjun kedalam dunia politik.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa permasalahan perempuan dalam dunia berpolitik adalah persoalan yang sangat kompleks. Karena budaya patrialistik mengambil peran yang sangat berlebihan terhadap kedudukan seorang kaum laki-laki. Sehingga peran perempuan hanya sekedar pendamping bagi kaum laki-laki. Dalam hal ini laki-laki sangat berkuasa untuk menentukan sebuah keputusan dan kebijakan dalam sebuah keluarga.

5.2.2 lemahnya Sumber Keuangan Dalam Aktifitas Penggalangan Masa Serta Atribut Kampaye

Dari hasil wawancara langsung bersama keenam responden. Hasil penelitian menemukan lemahnya sumber-sumber keuangan yang kurang memadai baik dari partai politik maupun dukungan keluarga dalam aktifitas seperti biaya sosialisasi, biaya kampaye(biaya, stiker, biaya baliho), adalah salah satu hal penyebab caleg perempuan tidak terpilih. Untuk memperkuat hasil temuan penulis mewawancarai, pertama dari Ibu Yohana Yowa Tangu dari partai HANURA beliau mengatakan bahwa:

“Memang dari segi finansial saya sedikit kurang menunjang, dan ini kali saya tidak perlu bermain uang dengan banyak karena saya sudah ikut pileg 2 kali tapi saya tidak terpilih di situ dimana saya benar-benar hancur dan uangnya habis tapi saya tidak bisa dapat apa-apa. Dan pada pemilihan kemarin saya punya atribut kampanye saya buat sendiri dan stikerpun minta bantuan dari keluarga untuk buat. Stikerpun tidak begitu banyak karna kurangnya uang. Oleh sebab itu saya sangat berharap ketika parpol merekrut kami sebagai caleg harus ada bantuan juga dari partai untuk membantu memperlancar pada saat masa kampaye.”¹⁹

¹⁸ Wawancara Dengan Bpk, Lasarus Benu, Tanggal 28 April 2019

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Yohana Yowa Tangu, Tanggal 29 April 2019

Selain itu juga pernyataan yang sama dari Ibu Adriana Moki Babang calon tidak terpilih dari partai PDIP mengatakan bahwa:

“Sejauh ini yang dapat saya rasakan kampanye tanpa uang memang hal yang paling mengerikan karena semua membutuhkan uang untuk mempersiapkan stiker, dan atribut kampanye, saya merasakan tanpa uang semua tidak bisa berbuat apa-apa, tim sukses saja turun untuk mencari masa harus memberikan uang jalan, tapi disaat mereka jalan mereka bukan bekerja untuk kita tapi mereka bekerja untuk orang lain.”²⁰

Caleg tidak terpilih dari partai DEMOKRAT Ibu Jeni Humba Tamar juga mengalami hal yang sama beliau juga mengatakan bahwa:

“Semenjak saya di rekrut untuk bergabung kepartai Demokrat dalam hati kecil saya berfikir bagaimana caranya saya mendapatkan uang untuk buat stiker dan atribut kampanye, dan akhirnya saya pinjam uang dikoperasi untuk membuat stiker dan di bantu oleh suami saya. Karna partai tidak sepersenpun dana yang mereka berikan untuk buat stiker, dan saya menyesal sudah rugi uang banyak tapi tidak terpilih, untuk kedepannya jika saya direkrut lagi oleh partai untuk menjadi caleg saya akan bilang kepada partai kalau bisa untuk dananya ada bantuan sedikit untuk meringankan sedikit beban ketika kami membuat stiker atau pun hal-hal yang berkaitan dengan kampanye.”²¹

Begitupun dengan Ibu Rambu Loda Ana Amah caleg tidak terpilih dari partai NASDEM beliau mengatakan bahwa:

“Saya menyadari belum saatnya saya maju tapi saya berfikir kalau memang saya lolos mungkin itu karna nasib saya, karna masyarakat jaman sekarang sudah tau mana yang baik dan tidak baik dan istilah masyarakat sekarang yang ada uang yang kita bisa pilih, jadi tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya uang adalah segala-galanya tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa semuanya harus butuh uang yang banyak. Jadi saya berharap ketika

²⁰ Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019

²¹ Wawancara Dengan Ibu Jeni Humba Tamar, Tanggal 27 April 2019

ingin maju sebagai caleg harus ada persiapan yang matang terutama yang berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan pada saat masa kampanye.”²²

Selanjutnya caleg tidak terpilih dari partai Golkar Ibu Rosye Martje Mauawang mengungkapkan bahwa:

“Salah satunya menentukan kita menang adalah uang, mengapa saya katakan demikian karena uang kita sangat membutuhkan untuk kasih makan minum pada saat kita kampanye orang datang pada saat kampanye tidak mungkin kita tidak kasih makan mereka, Pokoknya dari hal yang kecil sampai yang besar kita selalu membutuhkan uang, jadi tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan berharap kita bisa menang kalau uang tidak ada.”²³

Selain itu juga pengakuan dari Ibu Elisabeth caleg tidak terpilih dari partai PSI mengatakan bahwa:

“Selama saya menjadi calon legislatif yang sah dari partai PSI, saya selalu berusaha cari dana sendiri utang kiri-kanan supaya bisa buat stiker dan baliho, karena dari partai sendiri tidak sepersen pun mereka sumbang untuk saya buat stiker dan baliho, selama ini saya selalu bekerja keras untuk itu semua tapi saya sangat kecewa karena saya tidak terpilih padahal saya sudah begitu banyak rugi selama ini. Memang semua masyarakat Sumba menganggap kaum laki-laki lah yang lebih berkuasa dari itu semua.”²⁴

Lemahnya sumber keuangan membuat ketidak beruntungan bagi caleg perempuan dari keenam responden diatas yang diwawancarai, berdasarkan hasil wawancara dari keenam caleg mengungkapkan hal yang sama, dengan maju menjadi seorang caleg tanpa persiapan modal yang banyak itulah yang menjadi alasan utama mengapa caleg perempuan yang terjun ke kursi parlemen tidak satupun yang terpilih.

²² Wawancara dengan Ibu Rambu Loda Ana amah, Tanggal 28 April 2019

²³ Wawancara Dengan Ibu Rosye Martje Mauawang, Tanggal 30 April 2019

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Elisabeth, Tanggal 30 April 2019

Selain itu juga penulis mewawancarai pengurus partai mengenai atribut kampanye, serta kontribusi partai ke setiap caleg perempuan, yang pertama pengurus partai PSI Bapak Samuel H. Pati beliau mengatakan:

“Kontribusi dari kami partai sudah sangat cukup, kami selalu memberikan caleg dengan spanduk, merumuskan visi dan misi mereka, kalau memang soal menang dan tidak menangnya tergantung dari itu caleg sendiri bagaimana dia meyakinkan kepada masyarakat kalau dia bisa memimpin jika dia terpilih.”²⁵

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Ferdi Tiberius L. Djehasa ST beliau mengatakan bahwa:

“Memang kami dari partai tidak membiayai semuanya akan tetapi kami juga memberikan sedikit kontribusi untuk penggalangan masa, dan penyediaan spanduk dari kami partai sendiri selalu ikut sertakan semua caleg baik laki-laki maupun caleg perempuan, dan partai juga tidak serta merta membiayai semua kegiatan dengan memenangkan caleg tersebut.”²⁶

Selanjutnya apa yang dikatakan oleh pengurus partai Nasdem Bapak Niko Demus Hamakonda beliau mengatakan:

“Dari partai kami sendiri tidak lepas tangan begitu saja, kami juga selalu memperhatikan caleg dari partai kami, kami tidak membiarkan begitu saja. Dari partai sendiri memberikan mereka sedikit kontribusi untuk membuat stiker dan atribut kampanye, dan merumuskan visi, misi bagi caleg perempuan dari partai kami.”²⁷

Pernyataan dari ketiga pengurus partai diatas dapat diperkuat apa yang dikatakan oleh Bapak Dominggus L. Haling beliau mengatakan bahwa:

“Tidak semua biaya harus ditanggungkan kepada partai, mulai dari perlengkapan dari setiap caleg, tetapi partai hanya membiayai hanya sebagian saja seperti spanduk, dan kelengkapan yang seperti administrasi, untuk perlengkapan yang lain harus dibiayai oleh caleg

²⁵ Wawancara Dengan Bpk, Samuel H, Pati, Tanggal 15 April 2019

²⁶ Wawancara Dengan Bpk, Ferdi Tiberius L. Djehasa ST, Tanggal 16 April 2019

²⁷ Wawancara dengan Bpk, Niko Demus Hamakonda. Tanggal 15 april 2019

sendiri kalau partai harus biayai semua tidak mungkin lah. Jadi kita harus saling membantu satu sama lain.”²⁸

Maka sesuai wawancara dengan keempat pengurus partai ditemukan bahwa kontribusi partai seperti atribut kampanye, yang partai berikan tidak sepenuhnya dapat di berikan oleh partai tersebut, partai hanya menyiapkan spanduk dan menyertakan caleg pada saat kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa ketidak beruntungan caleg perempuan secara sosial ekonomi, yang rentan akan kemiskinan, kebodohan. Dan lemahnya sumber keuangan sangat berpengaruh terhadap caleg perempuan dan keterlibatan partai pengusung tidak sepenuhnya memberikan kontribusi kepada setiap caleg.

5.3 Hambatan Sosial Budaya

Faktor-faktor budaya yang menghambat partisipasi politik perempuan mejadi salah satu alasan mengapa perempuan tidak terpilih. Oleh karena itu, penulis menganalisis persoalan budaya melalui indikator berikut ini:

5.3.1 Label Steriotype

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa label *stereotype* yang ditanamkan pada kaum perempuan turut mempengaruhi citra baku yang melekat pada peran fungsi dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Hasil temuan diatas dapat diperkuat pada saat wawancara dengan Bapak Siprianus Karipi salah satu tokoh masyarakat di desa Komba Pari beliau mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sumba pada umumnya menganggap perempuan kelas kedua, dari dulu sampai dengan sekarang tugas kaum perempuan cuman masak di dapur dan mengurus rumah tangga, dan menganggap perempuan tidak tau apa-apa. dan saya tidak mau kaum perempuan

²⁸ Wawancara dengan Bpk, Dominggus L. Haling, Tanggal 18 2019

duduk di depan karena tugasnya dia cuman urus di dapur. Misalnya Tau pakei (orang yang sudah di belis) tidak boleh mengatur suaminya karena dia suda dibelis mahal”²⁹

Hal serupa juga yang di katakana oleh Bapak Samuel Bale Ngara seorang tokoh masyarakat yang di percayakan sebagai tua adat beliau mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sumba pada umumnya tidak mau kalau kaum perempuan bekerja di kantor atau menjadi pemimpin, karena kami masyarakat sumba menganggap perempuan cuman mengurus rumah tangga dan tugasnya memasak,. Kita boleh berbicara tentang gender tapi kita tidak bisa berpaling dari budaya yang sudah ada sejak neneng moyang wariskan. Hal ini tidak bisa dibanta oleh siapapun ini sudah menjadi salah satu aturan yang berlaku di masyarakat sumba pada umumnya.”³⁰

Apa yang dikatakan tokoh masyarakat dan Tua adat dapat di perkuat oleh apa yang disampaikan oleh Bapak Yulius Umbu Karipi selaku kepala Desa beliau mengatakan bahwa:

“Sejauh ini yang kita dapat ketahui bersama, masyarakat sumba menganut budaya patriarki, memang undang-undang sudah mengatur semuanya memungkinkan adanya keterwakilan perempuan di legislative, tapi kami masyarakat sumba pada umumnya tidak mau kalau perempuan melebihi derajat kaum laki-laki. Yang mungkin menurut adat kebiasaan budaya kita perempuan lebih dibawah dibandingkan kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa bila ada pengambilan keputusan apapun.”³¹

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Tua adat, dan kepala Desa menemukan bahwa pelabelan *stereotype* yang diberikan kepada kaum perempuan yang berada di Kabupaten Sumba Timur sangat mempengaruhi nilai jual untuk menjadi seorang caleg.

Demikian apa yang diungkapkan juga oleh Ibu Yohana Yowa Tunga caleg tidak terpilih dari partai Hanura beliau juga mengatakan bahwa:

²⁹ Wawancara dengan Bpk Siprianus Karipi, Tanggal 27 April 2019

³⁰ Wawancara dengan Bpk, Samuel Bale Ngara, Tanggal 27 April 2019

³¹ Wawancara dengan Bpk, Yulius Umbu Karipi, Tanggal 25 April 2019

“Sejauh ini yang saya lihat partai selalu memprioritaskan caleg laki-laki, bila ada kampanye kami kaum perempuan selalu diikutsertakan tetapi kami cuman ikut-ikutan begitu saja, tetapi partai selalu memprioritaskan kepada caleg laki-laki. Karena mereka menganggap laki-laki yang lebih superior. Seharusnya parpol harus betul-betul memperhatikan kami juga kaum perempuan.”³²

Selanjutnya senada juga apa yang dikatakan oleh Ibu Rose Martje Mauawang beliau juga mengatakan bahwa:

“Dari dulu sampai sekarang budaya masyarakat Sumba ini sangat sulit untuk dipengaruhi oleh siapa pun, karena masyarakat Sumba menganut budaya patriarki yang sangat kental, kami kaum perempuan sulit untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Jika kami berpartisipasi dalam dunia politik pasti kami tidak akan terpilih. Karena masih kentalnya budaya patriarki. Mungkin ini harapan saya kedepannya kalau bisa budaya seperti ini dihilangkan sehingga kami juga kaum perempuan bisa terpilih dalam pemilihan legislatif yang akan datang.”³³

Sama halnya dengan pendapat Ibu Rosye Martje Mauawang, Ibu Jeni Humba Tamar beliau juga mengatakan bahwa:

“Kita tidak heran lagi kalau pemberian pelabelan yang diberikan bagi kaum perempuan merupakan hal yang sudah wajar dalam kehidupan masyarakat Sumba pada umumnya. Masyarakat Sumba tidak mau sama sekali kalau perempuan terjun ke dunia politik, takutnya nanti kalau perempuan terpilih mereka yang memimpin laki-laki.”³⁴

Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Ibu Rambu Loda Ana Amah beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami selaku perempuan tidak terima sebenarnya kalau kami selalu dikatakan kelas kedua, karena kami juga bisa sebenarnya tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena adat

³² Wawancara Dengan Ibu Yohana Yowa Tunga, Tanggal 29 April 2019

³³ Wawancara dengan Ibu Rosye Martje Mauawang, Tanggal 30 April 2019

³⁴ Wawancara dengan Ibu Jeni Humba Tamar, Tanggal 27 April 2019

sumba sudah begitu mau tidak mau kami harus ikut adat yang sudah ada sejak neneng moyang ada. karena laki-laki menganggap perempuan cuman bisa di dapur.”³⁵

Senada juga apa yang dikatakan oleh Ibu Adriana Moki Babang beliau juga mengatakan bahwa:

“Mau dan tidak mau kami selaku perempuan yang tidak bisa berdaya yang selalu dianggap remeh kami selalu terima apa yang dikatakan oleh masyarakat. Karena kami tugasnya cuman kerja di dapur dan mengurus rumah tangga dan mengurus anak, tidak bisa melawan dengan budaya yang sudah ada yang selalu memposisikan kami perempuan kelas kedua.”³⁶

Di perkuat juga apa yang dikatakan oleh Ibu Elisabeth, beliau mengatakan bahwa:

“Pelabelan negative terhadap kami kaum perempuan bukan lah hal yang baru lagi. Dari segi adat istiadat yang sudah ada pada masyarakat sumba pada umumnya yang selalu didominasi oleh kau laki-laki. Karena mereka selalu menganggap kaum perempuan cuman bisa mengurus rumah tangga dan melayani suami selain itu kami kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, apa lagi mengambil sebuah keputusan itu sangatlah tidak mungkin.”³⁷

Dari hasil wawancara dengan keenam responden diatas dapat ditemukan bahwa pelabelan yang diberikan oleh masyarakat sumba selalu menilai kaum perempuan bila dapat dicalonkan menjadi anggota dewan apakah mereka bisa bekerja atau tidak, karena budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat sumba pada umumnya yang selalu menganggap perempuan tugasnya memasak di dapur.

Pelabelan yang diberikan kepada kaum perempuan penulis juga meyertakan masyarakat pemilih, yang pertama pemilih perempuan oleh Ibu Emiliana Folra W. Djehasa beliau mengatakan bahwa:

“Kami selaku kaum perempuan tidak bisa lagi membanta budaya yang sudah ada pada masyarakat sumba, jika kami melanggar pada budaya sumba maka ada sanksinya, karena itu sudah ada sejak kami lahir yang diwariskan oleh nenemoyang orang sumba, dan sejak kami kecil

³⁵ Wawancara dengan Rambu Loda Ana Amah, Tanggal 28 April 2019

³⁶ Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019

³⁷ Wawancara dengan Ibu Elisabeth, Tanggal 30 April 2019

kami selalu membantu ibu memasak didapur, pilih kayu api dan kasih makan babi, Budaya ini sudah tidak bisa lagi di rubah oleh sapa pun.”³⁸

Sama halnya juga apa yang dikatakan oleh Ibu Yulia Uru Emu beliau juga mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat sumba pada umumnya yang selalu menganggap perempuan kelas kedua atau mahluk yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, selalu saja kami kaum perempuan dikatakan hanya bisa mengurus rumah tangga dan mengurus anak di rumah. Kami pulang dari kantor masak dan melayani suami di rumah cuman itu yang bisa kami kerjakan, kami tidak bisa mengambil sebuah keputusan tanpa sepengetahuan suami.”³⁹

Hasil wawancara dengan kedua masyarakat pemilih diatas, penulis menemukan bahwa masyarakat pemilih mengakui budaya patriarki yang selalu menemptakan kaum perempuan pada kelas kedua.

Begitu juga dikatakan oleh masyarakat pemilih/ masyarakat yang dijadikan responden, yang pertama menurut Bapak Mandang Kabar Windi beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat pemilih saya tidak persoalan sapah saja yang masuk caleg maupun dia perempuan atau laki-laki saya tidak pusing dengan itu semua. Sapah pun dia yang terpilih yang saya harapkan cuman satu apakah dia bisa memimpin atau tidak, cuman itu yang saya harapkan, karena menjadi seorang pemimpin tidak lah mudah kita harus menahan semua cacian yang kita dengar dari masyarakat ”⁴⁰

Selanjutnya apa yang dikatakan oleh Bapak Lapu Remi Kati salah seorang masyarakat pemilih, beliau mengatakan:

“Seharusnya kita sebagai masyarakat pemilih kita tidak perlu memilih memandang bulu semuanya sama saja sebenarnya, akan tetapi dengan budaya kita di sumba yang sangat kental kita condong memilih kaum laki-laki untuk jadi seorang pemimpin karena mereka dianggap

³⁸ Wawancara dengan ibu Emiliana Flora W. Djehasa, Tanggal 15 April 2019

³⁹ Wawancara dengan Ibu Yuliana Uru Emu, Tanggal 18 April 2019

⁴⁰ Wawancara dengan Bpk, Mandang Kabar windi, Tanggal 1 Mei 2019

lebih superior dari perempuan. Tetapi budaya kita masyarakat sumba sangat keras dan ketat ya kita terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa karena budayanya sudah seperti itu.”⁴¹

Senada juga yang di sampaikan oleh Bapak Blasius Yon Pingu Meha seorang pemilih beliau mengatakan bahwa:

“saya menganggap bahwa kaum perempuan maju menjadi caleg sama dengan membangkang dari aspek budaya yang sudah disepakat bersama kalau kaum perempuan itu hanya mengurus di dapur dan mengurus anak dan laki-laki mencari nafka, seandai kaum perempuan terpilih menjadi seorang pemimpin sapah lagi yang mengurus dalam urusan rumah tangga.”⁴²

Dari hasil wawancara diatas dapat di perkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Hendrik Wunu beliau selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Masyarakat sumba penilaian terhadap kaum perempuan bukan hal yang baru lagi bagi kami masyarakat sumba. Kami menilai bahwa suatu hal yang fatal dan mustahil kalau seorang kaum perempuan memimpin kami dan mereka berada didepanya kami laki-laki. Bahwa budaya kita sudah di bekali oleh neneng moyang kita kalau perempuan cuman bisa mengurus rumah tangga dan mengurus anak di rumah.”⁴³

Wawancara penulis dengan masyarakat pemilih dapat ditemukan bahwa ada masyarakat pemilih yang pada saat menyoblos mereka harus melihat seorang figure yang dicalonkan, ada juga masyarakat pemilih yang selalu menganggap perempuan makhluk yang lemah, dan pada umumnya masyarakat sumba menempatkan perempuan dikelas kedua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa, pelabelan negative terhadap kaum perempuan masi sangat terasa dalam masyarakat sumba pada umumnya, karena perempuan tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa mengatur dalam rumah tangga dan tidak

⁴¹ Wawancara dengan Bpk, Lapu Remi Kati, Tanggal 1 Mei 2019

⁴² Wawancara dengan Bpk, Blasius Yon Pingu Meha, Tanggal 30 April 2019

⁴³ Wawancara dengan Bpk, Hendrik Wunu, Tanggal 29 April 2019

bisa dilibatkan apa bila ada pengambilan keputusan. Dan masyarakat menilai bahwa suatu hal yang fatal dan mustahil kalau seorang perempuan menjadi seorang pemimpin.

5.3.2 Marginilisasi

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah masyarakat adatnya yang sangat mengakar kuat dalam diri masyarakat sumba pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ndilu Maramba Djawa selaku ketua LPA beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai ketua LPA yang saya ketahui sejak dulu bahwa kita masyarakat sumba pada umumnya, perempuan hukum adatnya tidak boleh melebihi kuadrat seorang laki-laki, karena masyarakat selalu menganggap perempuan itu perempuan yang lemah dan tidak berdaya. Karena laki-laki menganggap perempuan sudah kita beli mereka dengan mahal masa mereka melebihi kuadrat kita sebagai laki-laki itu tidak bisa karena tugas mereka hanya bisa mengurus anak dirumah dan memasak di dapur. Dan masyarakat sumba tidak mau kalau ada pertemuan apa bila ada perempuan pada saat pertemuannya berlangsung. Karena anggap perempuan tidak bisa mengambil sebuah keputusan dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki atau suaminya.”⁴⁴

Apa yang disampaikan oleh Bapak Ndilu Maramba Djawa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Carles Hanaul Rambang salah satu tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Dapat kita ketahui bahwa perempuan pengetahuannya selalu terbatas di kalangan masyarakat, karena masyarakat pada umumnya menilai kalau kaum perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga tidak bisa kalau menjadi seorang pemimpin, menurut pandangan saya kaum perempuan boleh bercita-cita setinggi langit untuk menjadi seorang pemimpin tetapi tidak bisa untuk melebihi kuadrat laki-laki, karena sudah ada budaya yang mengaturnya.”⁴⁵

Sama halnya apa yang disampaikan oleh Ibu Marga Retha P. Jera selaku masyarakat pemilih beliau mengatakan bahwa:

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk, Ndilu Maramba Djawa, Tanggal 24 April 2019

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk, Carles Hanaul Rambang, Tanggal 24 April 2019

“Sebenarnya kami perempuan mau bersaing dirana politik atau menjadi seorang pemimpin, tapi itu semua cuman hanya ada dalam angan kami tetapi tidak akan pernah terwujud, tetapi apa boleh buat kami omong sapah yang mau dengar kami omong, contoh kecilnya saja bila ada pemilihan apapun suami selalu mengatakan kalau kita harus pilih si dia, maka dari itu kami tidak bisa berbuat apa-apa.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kesempatan perempuan untuk memperjuangkan haknya selalu dibatasi. Tetapi kenyataannya tidak ada jaminan apa-apa terhadap hak mereka. Dari pemahaman inilah bahwa peran perempuan semakin dijauhkan dalam ranah politik. Kita selalu menganggap kalau kaum perempuan itu adalah mahluk yang lemah dan tidak berdaya.

5.3.3 Budaya Patriarki

pada umumnya konteks masyarakat Indonesia lebih khususnya di Kabupaten Sumba Timur, yang dikenal dengan sangat kuatnya budaya patriarki. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penempatan posisi kaum perempuan selalu berada dibawah kaum laki-laki, kita tidak bisa pungkiri lagi kalau faktor-faktor penghambat jadi perempuan tidak bisa terpilih dalam pemilu legislatif kemarin tahun 2019. Dari keenam responden caleg perempuan tidak terpilih yang pertama menurut Ibu Yohana Yowa Tangu beliau mengatakan bahwa:

“Budaya kita orang sumba pada umumnya susah juga kalau kita omong, pengertian masyarakat terhadap kami kaum perempuan selalu menjadi bahan pembeciraan mereka dan selalu menjadi kambing hitamkan kami perempuan, Mereka selalu anggap remehkan kaum perempuan, pandangan mereka selalu saja mengatakan buat apa pilih mereka orang pendatang kita belis mereka mahal-mahal mau pinpin kita lagi di sini.”⁴⁷

Demikian juga wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang seorang caleg tidak terpilih, beliau juga mengatakan bahwa:

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Marga Retha P. Djera, Tanggal 10 April 2019

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Yohana Yowa Tangu, Tanggal 29 April 2019

“Saya sangat kecewa dengan ini semua sudah 2 kali saya menjadi caleg tapi tidak pernah terpilih, cenderung masyarakat memilih kaum laki-laki, karena mereka menganggap kaum laki-laki lah yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin di bandingkan oleh kaum perempuan. Karena kaum perempuan tidak mampu bila mengambil suatu keputusan.”⁴⁸

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Jeni Humba Tamar, seorang caleg tidak terpilih, beliau mengatakan bahwa:

“Memang kita tidak bisa persalahkan siapa-sapa lagi jika tidak terpilih, dengan budaya kita masyarakat sumba pada umumnya yang masih sangat keras mau sampe kapanpun kita caleg perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, faktor utama kami tidak terpilih adalah budaya patriarki yang masih sangat keras, karena pandangan masyarakat hanya laki-laki lah yang bisa memimpin dan mampu mengambil sebuah keputusan.”⁴⁹

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Rambu Loda Ana Amah, salah satu seorang caleg tidak terpilih, beliau juga mengatakan bahwa:

“Dijaman yang sekarang susah kalau kita hidup diantara yang budayanya yang didominasi oleh kaum laki-laki, kalau mau dan tidak mau sebenarnya saya mampu bersaing di dunia politik. Dan saya sadar diri juga kalau saya hanyalah seorang pendatang di kampung sini jadi ada baiknya juga kalau masyarakat disini tidak pilih saya karena saya sudah dibelis mahal-mahal masa saya memimpin mereka lagi”⁵⁰

Hal serupa juga apa yang diungkapkan oleh Ibu Rose Martje Mauawang seorang caleg tidak terpilih, beliau juga mengatakan bahwa:

“Saya sangat rasa sekali pada saat saya turun sosialisasi ke setiap desa-desa, ada masyarakat yang bilang ia nanti pasti kami pilih ibu pas pemilihan berjalan, dan saya juga merasa senang karena mereka kasih harapan yang begitu besar, tetapi pada saat pemilihan dimana saya didesa itu yang saya pergi sosialisasi tidak satupun suara saya. Memang budaya kita di sumba sangat didominasi oleh kaum laki-laki.”⁵¹

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Adriana Moki Babang, Tanggal 29 April 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Jeni Humba Tamar, Tanggal 27 Mei 2019

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Rambu Loda Ana Amah, Tanggal 28 April 2019

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Rosye Martje Mauawang, Tanggal 30 April 2019

Senada apa yang dikatakan oleh kelima Ibu diatas, Ibu Elisabeth beliau mengatakan bahwa:

“Susah juga kalau kita omong kita punya budaya di sumba, mau sampe kapan kalau kayak begini trus yang selalu mengkambing hitamkan kaum perempuan yang selalu menganggap kaum perempuan adalah mahluk yang lemah dan tidak berdaya. Sangat susah kalau kita hidup di budaya yang dominannya oleh kaum laki-laki.”⁵²

Kebiasaan masyarakat sumba yang selalu melatarbelakangi perempuan seorang pendatang dan kenapa harus dicalonkan seorang anggota caleg legilatif. Jika nanti dia terpilih pasti dia akan memimpin kita buat apa pilih dia. Itu lah pengakuan caleg perempuan yang tidak terpilih, karena budayanya yang kental akan kehadiran sebagai penunjang pekerjaan kaum laki-laki, bukan sebagai penentu pengambilan keputusan.

Untuk memperkuat hasil wawancara dengan responden di atas penulis juga mewawancarai tokoh masyarakat dan tokoh adat. Yang pertama wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Stefanus Windi beliau mengatakan bahwa:

“Dengan kerasnya budaya sumba, salah satu budaya patriarki yang mengaruskan kaum perempuan untuk mengurus urusan dapur, tujuan laki-laki membanyar belis mahal-mahal untuk membantu suami dan melayani seorang suami kalau suami pergi kerja kalau pulang makan sudah siap dimeja makan. Jadi kaum perempuan cumin bisa mengurus rumah tangga, jadi tidak heran lagi dengan budaya kami masyarakat sumba yang selalu menomor dua kan kaum perempuan.”⁵³

Senada dengan yang dikatakan oleh seorang tokoh adat Bapak Dapa Konda Meha beliau mengatakan bahwa:

“Budaya masyarakat sumba memang di dominasi oleh kaum laki-laki. Memang hukum adat kita sangat keras contoh kecilnya saja bila ada duduk untuk bermusyawarah kau laki-laki sama sekali tidak memperbolehkan kaum perempuan untuk terlibat dalam musyawarah tersebut, apa bila ada caleg yang datang kerumah bersosialisasi pasti pikiran kami sudah ke sana, apakah

⁵² Wawancara dengan Ibu Elisabeth, Tanggal 30 April 2019

⁵³ Wawancara dengan Bpk, Stefanus Windi, Tanggal 28 April 2018

dia mampu tidak seperti kami laki-laki bila mengambil suatu keputusan. Maka dari itu kami pada umumnya masyarakat sumba kami selalu menomor dua kan kaum perempuan bila ada urusan apapun, baik urusan adat maupun urusan politik”⁵⁴

Hasil wawancara tokoh adat dan tokoh masyarakat diatas menunjukkan kekuatan budaya yang ada di masyarakat sumba tidak bisa lagi dibantah lagi sudah terbukti perempuan perempuan dibelis mahal-mahal datang kerumah laki-laki untuk membantu suami dan melayani suami.

Masyarakat pemilih oleh kaum perempuan sendiri seharusnya dia memilih kaumnya tetapi dia tidak memilihnya dari hasil wawancara dengan seorang masyarakat pemilih perempuan, Ibu Anas Ipa Hoy beliau mengatakan bahwa:

“Saya sebagai ibu pengurus rumah tangga saya tidak bisa menentukan pilihan saya sendiri, dan saya hanya mengurus dapur dan dan menurus anak, dalam menentukan pilihan kami dalam keluarga selalu melakukan diskusi-diskusi kecil dengan suami untuk menentukan pilihan sapah yang mau kita pilih nanti.”⁵⁵

Sama hal yang di sampaikan oleh Ibu Magda Lena Loda Nangi selaku masyarakat pemilih beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya di Sumba ini sendiri budaya patriarki masih sangat kental kita lihat saja baru-baru ini saat pemilihan legislative tidak ada satupun caleg perempuan yang terpilih, harapan saya kedepannya agar kalau bias budaya-budaya seperti ini harus dihilangkan, dengan adanya budaya seperti itu kami kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa lagi.”⁵⁶

Wawancara dengan masyarakat pemilih diatas ditemukan bahwa ketergantungan terhadap laki-laki sebagai suami sangatlah tinggi. Hal utama kekelahan caleg perempuan dalam pileg 2019, salah satu masalahnya adalah budaya patriarki yang sudah melekat pada masyarakat sumba pada umumnya, bertarung melawan kaum laki-laki bukan hal yang mudah sangat

⁵⁴ Wawancara dengan Bpk, Dapa Konda Meha, Tanggal 1 27 April 2019

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Anas Ipa Hoy, Tanggal 25 April 2019

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Magda Lena Loda NAngi, Tanggal 26 April 2019

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mempengaruhi pola pikirnya masyarakat yang selalu merehkan kaum perempuan dalam kehidupan berpolitik.

Gambar 6

Foto dokumentasi kegiatan pada saat masyarakat mengikuti pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Caleg pada daerah pemilihan Kabupaten Sumba Timur, pada pemilu 2019.⁵⁷



Foto di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pesta demokrasi. Hal ini harus terus di jaga agar kedepannya semangat masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi tidak mudah hilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi dilapangan, menunjukkan bahwa faktor budaya patriarki merupakan hal yang paling utama membuat kaum perempuan tidak terpilih pada pileg 2019 kemarin di Kabupaten Sumba Timur, persepsi masyarakat

⁵⁷ Sumber: dokumentasi peneliti tanggal 17 April 2019

mengenai politik, politik selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat maskulin yang dianggap perempuan yang feminim. Selalu dianggap kalau kaum perempuan tidak pantas untuk terjun ke dunia politik yang keras karena menganggap bahwa kaum perempuan memiliki watak yang lemah lembut dan tidak tegas

Gambar 7

Foto dokumentasi kegiatan pleno di kantor KPU kabupaten Sumba Timur, pada pemilu 2019.⁵⁸



⁵⁸ Dokumentasi penulis, Tanggal 22 april 2019

Gambar 8

Foto dokumentasi kegiatan saat penutupan pleno di kantor KPUD Kabupaten Sumba

Timur pada pemilu legislatif Tahun 2019.⁵⁹



Gambar diatas menunjukan Pleno yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Timur. Rapat pleno tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh ketua KPU Kabupaten Sumba Timur oleh Bapak Oktavianus Landi dan didampingi tiga komisioner KPU dan sekretaris KPU Kabupaten Sumba Timur. Ada pun sebelum pleno pimpinan rapat Oktavianus Landi membacakan tata tertip dalam rapat pleno selanjutnya pembacaan hasil rekapitulasi tingkat PPK kecamatan. Dalam pelaksanaan pleno yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur berjalan jujur, adil dan

⁵⁹ Dokumentasi penulis, Tanggal 7 mei 2019.